

**PENEGAKAN HUKUM MALADMINISTRASI PELAYANAN
PERTANAHAN DI KOTA SURABAYA MELALUI REKOMENDASI
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

ALEXANDER ARTA H.GULTOM
NPM. 1671010111

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2020**

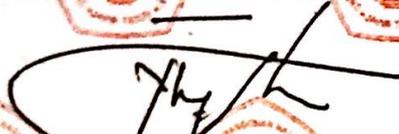
LEMBAR PENGESAHAN REVISI SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM MALADMINISTRASI PELAYANAN
PERTANAHAN DI KOTA SURABAYA MELALUI REKOMENDASI
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR

Oleh :

ALEXANDER ARTA H. GULTOM
NPM. 1671010111

Telah direvisi dan diterima oleh Tim penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Jumat, 27 Juli 2020

PEMBIMBING


FAUZUL ALIWARMAN, SHI.M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

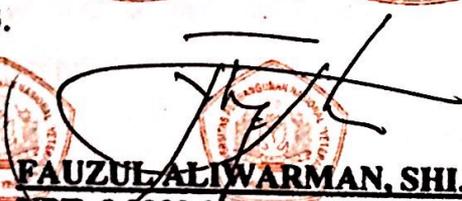
TIM PENGUJI


EKO WAHYUDI, S.H. M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

2.


WIWIN YULININGSIH, S.H. M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225

3.


FAUZUL ALIWARMAN, SHI.M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. SUTRISNO, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

iv

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM MALADMINISTRASI PELAYANAN
PERTANAHAN DI KOTA SURABAYA MELALUI REKOMENDASI
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR

Oleh :

ALEXANDER ARTA H. GULTOM
NPM. 1671010111

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Jumat, 17 Juli 2020

PEMBIMBING


FAUZUL ALIWARMAN, SH.I.M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

TIM PENGUJI

1.


EKO WAHYUDI S.H., M.H.
NPT/B 7808 07 0222

2.


WIWIN YULININGSIH, S.H., M.Kn.
NPT. 3 7507 07 0225

3.


FAUZUL ALIWARMAN, SH.I.M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. SUTRISNO, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

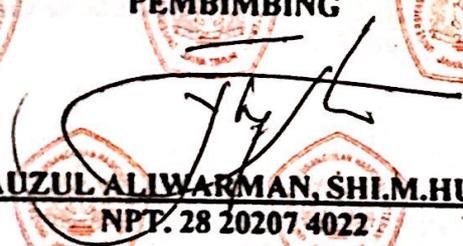
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM MALADMINISTRASI PELAYANAN
PERTANAHAN DI KOTA SURABAYA MELALUI REKOMENDASI
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR

Disusun Oleh :

ALEXANDER ARTA H. GULTOM
NPM. 1671010111

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi pada tanggal 7 Juli 2020

PEMBIMBING


FAUZUL ALIWARMAN, SH.M.HUM
NPT. 28 20207 4022

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. SUTRISNO, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 1001

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM

Jl. Raya Rungkut Madya Gunung Anyar – Surabaya 60294 Telp. (031) 8794313, 8706369
http://www.fhupniatim.ac.id

SURAT PENUGASAN PEMBIMBING PROPOSAL/SKRIPSI

Nomor : SP/4/7/UN63.6/AD/XII/2019

1. Dalam rangka Program Proposal /Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : ALEXANDER ARTA H. GULTOM

NPM : 1671010111

Program Studi : ILMU HUKUM

2. Menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi :

Nama Pembimbing : FAUZUL ALIWARMAN, SHI, M.Hum

NIP/NPT : 3 8202 07 0221

3. Untuk masa 2 (dua) semester tmt. 07 November 2019

4. Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Surabaya, 18 Desember 2019
Koordinator Program Studi



EKO WAHYUDI, SH., MH
NPT. 3 7808 07 0222

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALEXANDER ARTA H GULTOM
Tempat/ Tanggal lahir : Surabaya, 22 Agustus 1998
NPM : 1671010111
Konsentrasi : Tata Negara
Alamat : Jl. Pucang Sawit No.50, Kota Surabaya

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM MALADMINISTRASI PELAYANAN PERTANAHAN DI KOTA SURABAYA MELALUI REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR"** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 7 July 2020

Mengetahui,
Pembimbing


FANZUL ALIWARMAN, SHL., M.Hum
NPT. 28 20207 4022

Penulis

ALEXANDER ARTA H. GULTOM
NPM. 1671010111

Scanned with CamScanner

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puja dan Puji Syukur atas Kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menyusun dan menyelesaikan Skripsi ini. Disini Penulis mengambil Judul **“PENEGAKAN HUKUM MALADMINISTRASI PELAYANAN PERTANAHAN DI KOTA SURABAYA MELALUI REKOMENDASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR”**.

Penulisan Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam prakteknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal - hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna penyusunan Skripsi. Penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.

4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang sudah menyempatkan waktu dan perhatian untuk memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak Panggung Handoko, S.H., selaku Dosen Wali di Fakultas Hukum.
7. Bapak dan Ibu Tim Penguji Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk penulis kedepannya.
8. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
9. Bapak Dr. Agus Widiyarta, S.Sos., M.Si, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur yang telah memberi izin untuk melaksanakan Penelitian Skripsi.
10. Bapak Sidik Nugraha, S.Kom, selaku pembimbing penelitian skripsi di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
11. Seluruh Asisten di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang sudah membantu dan membimbing dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini.
12. Ayah dan Ibu saya yang telah mendukung dan membiayai segala kebutuhan yang diperlukan selama masa perkuliahan dari awal hingga akhir proses

perkuliahan saya serta kakak saya yang juga mendukung dan memberi perhatian dalam penyusunan skripsi ini.

13. Erico dan eprin yang senantiasa membantu memberikan saran dalam penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman mandiri Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur kelas C angkatan 2016 yang dikenal sebagai kelas luar biasa nakalnya yang telah memberi dukungan dan bantuan dari semester awal perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi.
15. Teman-teman Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur lainnya yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menulis Proposal Skripsi ini.
16. Seluruh teman-teman PUBG Mobile terutama squad King Crabs yang telah mendukung dan menghibur saya selama penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi Mahasiswa ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak sangat penyusun harapkan demi penyempurnaan Skripsi ini.

Surabaya, 7 July 2020
Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN REVISI PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAKSI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Kajian Pustaka	8
1.6. Jenis Penelitian	34
1.6.1. Sumber Data	35
1.6.2. Metode Pengumpulan Data	36
1.6.3. Metode Analisis Data	37
1.6.4. Lokasi Penelitian	38
1.6.5. Sistematika Penulisan	38

BAB II BENTUK – BENTUK MALADMINISTRASI	
PELAYANAN PERTANAHAN DI KOTA SURABAYA ...	40
BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP	
MALADMINISTRASI PADA PELAYANAN	
PERTANAHAN DI KOTA SURABAYA	50
3.1. Penegakan Hukum Maladministrasi Pada Pelayanan	
Pertanahan Di Kota Surabaya	50
3.2. Penerapan Sanski Terhadap Instansi Yang Melakukan	
Maladministrasi Dalam Pelayanan Pertanahan Di Kota	
Surabaya	58
BAB IV PENUTUP	69
4.1. Kesimpulan	69
4.2. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Laporan Maladministrasi Yang Masuk di ORI Perwakilan Jawa Timur	42
Tabel 2. Jumlah Kasus Dan Bentuk Maladministrasi Pelayanan Pertanahan Kota Surabaya Tahun 2017-2019	44
Tabel 3. Data Hasil Pemeriksaan Oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penugasan

Lampiran 2. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3. Kartu Rencana Studi

Lampiran 4. Transkrip Sementara

Lampiran 5. Data Pembayaran Mahasiswa

Lampiran 6. Bukti Penyerahan Proposal

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : ALEXANDER ARTA H GULTOM
NPM : 1671010111
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 22 Agustus 1998
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**“PENEGAKAN HUKUM MALADMINISTRASI PELAYANAN
PERTANAHAN DI KOTA SURABAYA MELALUI REKOMENDASI
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN JAWA TIMUR”**

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur terhadap maladministrasi yang terjadi pada pelayanan pertanahan di Kota Surabaya. Penegakan hukum yang dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur terhadap maladministrasi tersebut yang terjadi di BPN Kota Surabaya diberikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur sebagai hasil akhir terhadap pemeriksaan laporan yang diterima dan terbukti telah terjadi maladministrasi yang selanjutnya diberikan kepada Instansi terlapor yaitu dalam hal ini BPN Kota Surabaya dengan kesimpulan yang ada di dalamnya termasuk arahan atau rekomendasi yang diberikan kepada BPN Kota Surabaya. Adapun dalam bentuk-bentuk sanksi yang diberikan terhadap Instansi yang melakukan maladministrasi, perlu ditambahi dengan sanksi tertulis yang diberikan juga oleh Ombudsman RI berupa teguran langsung ataupun tidak langsung terhadap siapapun pejabat publik yang terbukti melakukan tindakan maladministrasi di setiap laporan yang terjadi maladministrasi meskipun laporan tersebut tidak menimbulkan kerugian yang berat namun tetap diperlukan sanksi tertulis sebagai tambahannya agar berdampak langsung terhadap pejabat publik yang melakukan tindakan maladministrasi agar merasa sedikit jera dan menjadi contoh pejabat sekitarnya untuk tidak melakukan tindakan yang sama sehingga dapat mengurangi tindakan maladministrasi khususnya pada pelayanan pertanahan di Kota Surabaya.

Kata Kunci : *Maladministrasi, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Penegakan Hukum.*